

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep akuntansi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970-an di eropa. Pada pertengahan tahun 1990-an Komite Standard Akuntansi Internasional (*The International Accounting Standards Committee/ IASC*).

Mengembangkan prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan dan audit hak azasi manusia.

Penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi perusahaan mendorong kemampuan untuk meminimalisasi persoalan-persoalan lingkungan yang dihadapinya. Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environmental protection*).

Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi konvensional dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan mengukur dampak-dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam istilah-istilah keuangan. Sedangkan akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu perusahaan berdasarkan lingkungan, tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk fisik (sisa barang produksi dalam kilogram, pemakaian energy dalam kilojoules, dll), akan tetapi standard pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan keuangan.

Akuntansi lingkungan merupakan suatu proses untuk pengidentifikasian, pengumpulan serta penganalisisan berbagai informasi tentang biaya serta kinerja

Dengan tujuan agar dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan organisasi.

Dalam pelaksanaan akuntansi lingkungan terdapat tiga faktor yang memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu faktor ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi lingkungan, dan manajemen lingkungan.

Faktor pertama yaitu ukuran organisasi / Perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran organisasi dapat diukur dengan tingkat penjualan, jumlah pekerja, tingkat peputaran, total aset, dan pendapatan laba. Organisasi/perusahaan ukuran besar cenderung menyiapkan sistem akuntansi mereka untuk meningkatkan level pengungkapan informasi lingkungan menjadi lebih terbuka dari pada organisasi ukuran kecil. Dan ukuran perusahaan dalam penelitian ini sendiri didasarkan pada total aset dan jumlah tenaga kerja (Azzahra dan Susanto, 2015).

Terkait ukuran organisasi dengan pelaksanaan akuntansi lingkungan maka terdapat suatu permasalahan pada dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Medan belum memiliki UPT untuk sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas pelayanan sampah. (<http://medantribunnews.com>, 2019). Dan Pegawai Harian Lepas (PHL) di kota Medan terbilang sangat banyak bahkan sampai ribuan sehingga pemerintah kota Medan menghimbau pada OPD pemerintah kota Medan agar mengurangi Pekerja Harian Lepas dikarenakan memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD (<https://sumutpos.co.id>, 2019).

(Nor Hadi, 2011;8) menjelaskan bahwa variable ukuran organisasi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan adalah teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan, semakin besar ukuran instansi atau perusahaan maka

pengaruh instansi atau perusahaan terhadap masyarakat juga semakin besar. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*). Oleh karena itu, teori legitimasi menjadi landasan bahwa ukuran organisasi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Penelitian terdahulu menyatakan Ukuran Organisasi tidak berpengaruh terhadap Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan (Ni Luh Dial Septiana, 2018). Sedangkan menurut (Herman Damanik, 2015) menyatakan Ukuran Organisasi berpengaruh terhadap Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan.

Faktor kedua pernyataan standar akuntansi di Indonesia aturan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik tertulis di peraturan pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melalui PSAK no.1 paragraf 9 juga telah menjelaskan tentang penyajian laporan untuk aktivitas lingkungan suatu perusahaan. Komite pembuat pernyataan Standar Akuntansi menganggap keberadaan standar akuntansi tentang lingkungan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi lingkungan (Prasojo dan Purwanto, 2013).

Selain itu terkait pernyataan standar akuntansi dengan pelaksanaan akuntansi lingkungan terdapat suatu permasalahan pada dinas kebersihan dan dinas lingkungan hidup kota medan masih sederhana dalam melakukan pemisahan biaya-biaya dalam pelaporan keuangannya pada pelaporan akuntansi lingkungan di karenakan terkhusus pada dinas kebersihan kota medan masih belum adanya pelakuan dalam pengoperasian sampah.

(Prasojo 2013) menjelaskan bahwa variable pernyataan standar akuntansi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan adalah teori system dan pertanggungjawaban sosial. Teori dan sistem pertanggungjawaban sosial menjelaskan, pengaruh peraturan atau regulasi yang dibuat pemerintah berpengaruh langsung terhadap kebijakan dan kinerja instansi dan perusahaan. Pernyataan standar akuntansi pemerintah dan pernyataan standar akuntansi perusahaan memengaruhi penerapan pelaksanaan akuntansi lingkungan. Oleh karena itu teori sistem dan pertanggungjawaban sosial menjadi landasan bahwa pernyataan standar akuntansi memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Penelitian terdahulu menyatakan pernyataan standar akuntansi berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan (Agustina korbaffo, 2016). Sedangkan menurut (Ari RetnoHandayani, 2010) pernyataan standar akuntansi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Faktor ketiga Manajemen lingkungan merupakan suatu kerangka kerja yang dapat diintegrasikan kedalam proses-poses bisnis yang ada untuk mengenal, mengukur, mengelola, dan mengontrol dampak lingkungan secara efektif, dan oleh karenanya merupakan risiko-risiko lingkungan. Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis dan prosedural dapat bersifat menjelaskan pengungkapan lingkungan dan menjadi faktor penentu dari pelaksanaan akuntansi lingkungan di sektor privat dan sektor swasta (Prasojo, 2013).

Selanjutnya terkait manajemen lingkungan dengan pelaksanaan akuntansi lingkungan terdapat suatu permasalahan adanya kelemahan yang terjadi pada dinas lingkungan hidup kota Medan dalam melakukan manajemen pengawasan pengelolaan sampah dan B3, hal ini ditandai banyaknya sampah plastik dan limbah pabrik yang dibuang kesungai deli, sehingga lingkungan yang berada di kota medan masih berdampak kotor, serta tidak adanya pengoperasian daur ulang sampah yang di lakukan dinas kebersihan kota medan sehingga tumpukan sampah yang berada di TPA menjulang tinggi setiap harinya dan membuat polusi udara bau yang tidak bagus di hirup bagi kesehatan.

(Rankin et.al;2017) menjelaskan bahwa variable lingkungan memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan adalah teori pemangku kepentingan (*stakeholder*). Landasan teori pemangku kepentingan, yaitu eksistensi instansi dan perusahaan dipengaruhi oleh dukungan pemangku kepentingan, pengelola instansi dan manajemen perusahaan akan menerapkan manajemen lingkungan dan pelaksanaan akuntansi lingkungan terlebih, pemerintah juga pemangku kepentingan sehingga desakan penerapan manajemen lingkungan dan pelaksanaan akuntansi lingkungan semakin kuat. Oleh karena itu, pemangku kepentingan (*stakeholder*) menjadi landasan bahwa manajemen lingkungan memengaruhi pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Penelitian terdahulu menyatakan manajemen lingkungan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan (Taufiq Bagus Prasajo, 2013). Sedangkan menurut (Gagas Wirasta, 2017).Manajemen lingkungan atau kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.

Pelaksanaan akuntansi lingkungan menjadi penting karena dalam perusahaan/instansi menganggap akuntansi lingkungan menjadi bukti pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan dengan pelestarian lingkungan.

Alasan peneliti memilih judul ini untuk mengetahui apakah instansi di kota Medan mengerti akan tanggung-jawabnya seperti yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009. Serta alasan lainnya yakni ingin mengetahui kendala instansi dalam menjalankan akuntansi lingkungan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas kebersihan kota Medan belum memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) khusus untuk membantu melaksanakan tugas pelayanan sampah sehingga belum adanya pegawai yang terbentuk didalamnya.
2. Pemerintah Kota Medan masih minim dalam melakukan pemangkasan/pengurangan Pegawai Harian Lepas (PHL).
3. Masih sederhananya pemisahan biaya biaya atas pelaporan keuangan akuntansi lingkungan pada dinas kebersihan Pertamanan dan dinas lingkungan hidup kota Medan.

4. Belum adanya pengoperasian daurulang/pengelolaan sampah yang menghasilkan nilai ekonomis pada dinas kebersihan kota Medan.
5. Masih lemahnya pengawasan pengelolaan limbah B3 oleh dinas lingkungan hidup kota Medan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang tidak terlalu luas dalam penelitian ini, maka penulis hanya membatasi masalah pada “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan (Khususnya Pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh ukuran organisasi/perusahaan (jumlah asset dan pegawai) terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan?
2. Bagaimana pengaruh pernyataan standar akuntansi lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan?
3. Bagaimana Pengaruh Manajemen Lingkungan terhadap Pelaksanaan akuntansi lingkungan?
4. Bagaimana pengaruh ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi, lingkungan, dan manajemen lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran organisasi terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.
2. Untuk menganalisis pengaruh pernyataan standar akuntansi lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.
3. Untuk menganalisis pengaruh manajemen lingkungan terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran organisasi, pernyataan standar akuntansi lingkungan, dan manajemen lingkungan terhadap akuntansi lingkungan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Kota Medan

Adapun manfaat penelitian bagi pemerintah kota Medan adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah kota Medan mampu melaksanakan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi dalam membuat kebijakan dan peraturan pemerintah kota Medan dalam pelaksanaan akuntansi lingkungan.
3. Dapat menjadi bahan masukan bagi organisasi perangkat daerah pemerintah kota Medan.

b. Bagi Penulis

adapun manfaat penelitian ini bagi penulis adalah :

1. Menambah atau memperluas pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri, khususnya mengenai faktor pelaksanaan akuntansi lingkungan.

c. Bagi Peneliti Lainnya

1. Dapat menjadi bahan acuan referensi bagi peneliti yang lain pada judul yang sama.